

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota-kota bergaya Eropa mulai berkembang seiring dengan kedatangan bangsa Barat di Nusantara. Kedatangan orang-orang Eropa dengan kepentingan kolonialisme tersebut membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak dari kolonialisme tersebut ialah munculnya pengaruh yang kuat dalam hal modernisasi sebuah kota. Kota-kota pada masa kolonial dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan konsep kota di Eropa, baik dari tata ruang maupun gaya arsitektur.

Pada kota kolonial, jenjang atau struktur pemerintahan kolonial Belanda meneruskan kota-kota tradisional yang sebelumnya sudah ada. Struktur pemerintahan yang diterapkan hampir meniru dengan struktur sebelumnya. Hal tersebut memberi pengaruh yaitu dijadikannya ibu kota pemerintahan sebelumnya sebagai ibu kota pemerintahan kolonial secara berjenjang pula. Tidak ada kota yang dibentuk dari awal.¹ Umumnya mereka hanya memanfaatkan kota yang sudah ada dan pada periode berikutnya ditingkatkan menjadi lebih sempurna. Misalnya di Jawa bagian timur terdapat *gezaghebber van den oosthoek* yang berpindah dari Semarang ke Surabaya. Setelah berakhirnya masa VOC, pemerintah kolonial mengganti *gezaghebber* dengan keresidenan. Dalam hal ini, keresidenan Surabaya

¹Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 99.

membawahi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto.² Kota-kota tersebut kemudian menjadi ruang bagi berbagai etnis dari Eropa, Timur Asing, ataupun Bumiputera untuk hidup.

Dikeluarkannya *Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie* atau yang lebih dikenal dengan nama *Decentralisatie Wet 1903* mengawali perubahan status kota-kota otonom yang terpisah dengan pusat tetapi tetap bertanggungjawab terhadap pusat.³ Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, kota-kota besar di Hindia-Belanda berubah status menjadi *gemeente* dengan pengelolaan dari pemerintah kota sendiri. Berbagai permasalahan muncul dalam kota dan perlu penanganan oleh pemerintah kota sendiri. Salah satu masalah yang terjadi ialah pada kondisi lingkungan perkampungan yang buruk.

Pada awal abad ke-20, perkampungan di kota-kota besar umumnya masih dalam kondisi yang semrawut. Rumah-rumah milik bumiputra di perkampungan seringkali dituduh sebagai sumber penyakit yang sedang mewabah pada kota. Hal tersebut disebabkan karena kondisi pemukiman bumiputra yang dibangun dengan bahan yang sangat sederhana. Rumah-rumah tersebut terbangun dari bahan-bahan yang ditemukan di sekeliling mereka dengan jalan-jalan yang sempit dan becek pada musim hujan. Rumah-rumah tersebut berupa gubuk-gubuk bambu tanpa dilengkapi dengan ventilasi. Ini sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi

²Purnawan Basundoro, *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi 1906-2012*, (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2012), hlm 2-3.

³*Ibid.*, hlm. 105.

pemukiman masyarakat Eropa yang tinggal di rumah dengan model *real estate*.⁴ Hal seperti ini yang kemudian dipublikasikan oleh Tillema dalam tulisannya mengenai situasi yang tidak higienis di perkampungan Jawa tentang penyakit, banjir, sampah, dan daftar-daftar kematian.⁵

Lingkungan kampung yang buruk seperti yang telah digambarkan diatas, diperparah dengan tidak adanya saluran air yang dapat digunakan untuk mengalirkan air ketika hujan. Akibatnya ketika curah hujan tinggi, kampung-kampung seringkali mengalami banjir. Air menggenangi perkampungan selama berhari-hari karena tidak ada saluran yang dapat menampung air hujan. Genangan air ini dapat mengundang nyamuk untuk hidup disana, sehingga hal ini berakibat pada menyebarnya penyakit malaria.

Pada mulanya, tidak ada upaya yang dapat dilakukan oleh dewan kota untuk meningkatkan kondisi kampung. Hal tersebut disebabkan adanya aturan bahwa pemerintah dilarang ikut campur tangan dalam urusan bumiputera.⁶ Aturan ini

⁴Purnawan Basundoro, "Politik Rakyat Kampung di Kota Surabaya Awal Abad ke-20", dalam *Jurnal Sasdaya, Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 1, No. 1, November 2016, hlm. 4.

⁵H.F. Tillema adalah seorang anggota dari *gemeenteraad* Semarang yang pernah melakukan penelitian untuk melihat kondisi fisik dan kesehatan di kampung-kampung di Jawa. Kondisi kampung yang sangat jauh dari kata layak menjadi sorotan. Ia memotret kondisi kampung-kampung dan menemukan fakta bahwa rumah-rumah penduduk tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat tinggal. Ia menawarkan solusi untuk mengatasi perkampungan yang buruk. Inti dari gagasan tersebut adalah adanya campur tangan kekuasaan secara riil untuk melakukan berbagai usaha dalam mengatasi kemiskinan dan pemukiman kumuh. Lihat di Radjimo Sastro Wijono, "Pemukiman Rakyat di Semarang Abad XX: Ada Kampung Ramah Anak" dalam Freek Colombijn, dkk. (ed.), *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 154 dan Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Zaman Kolonial sampai Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 47-50.

⁶Handinoto, *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII Sampai Pertengahan Abad XX*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 143.

terdapat dalam undang-undang kolonial yang melindungi otonomi administratif desa otonomi atau kota asli yang terletak di dalam batas kota. Hal tersebut kemudian membentuk tantangan administratif dan solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menghapus prinsip otonomi kampung tersebut.⁷

Kota Mojokerto sendiri mengalami perubahan status menjadi *gemeente* pada tahun 1918. Penetapan status *gemeente* tersebut dilakukan melalui *Besluit* Gubernur Jendral Johan Paul van Limburg Stirum Nomor 324 Tahun 1918 tertanggal 10 Juli 1918 dan diberlakukan mulai 1 Juli 1918.⁸ Setelah terbentuknya *gemeente*, berdasarkan *Stadsgemeente Ordonantie* No. 365 Tahun 1926, seluruh kota yang berstatus *gemeente* berubah menjadi *stadsgemeente*.⁹ Namun secara resmi, *gemeente* Mojokerto berubah menjadi *stadsgemeente* pada tahun 1928.¹⁰

Pemberian status otonomi penuh kepada kota-kota di Hindia-Belanda merupakan suatu pijakan kuat dalam rangka membangun kotanya. Dibentuknya *stadgemeente* memungkinkan Kota Mojokerto untuk mengelola kotanya sendiri. Berbagai pembangunan dilakukan untuk menunjang kehidupan kota. Pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan. Jalan-jalan penghubung di sekitar ibu kota mulai

⁷Hans Versnel dan Freek Colombijn, "Ruckert and Hoesni Thamrin: Bureaucrat and Politician in Colonial Kampong Improvement", dalam Freek Colombijn and Joost Cote (ed.), *Cars, Conduits, and Kampongs The Modernization of the Indonesian City 1920-1960*, (Leiden: Brill, 2015), hlm. 126.

⁸Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, *Kota Mojokerto dalam Lintas Hikayat dan Sejarah*, (Mojokerto: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, 2016), hlm. 67.

⁹Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, *op.cit.*, hlm. 110.

¹⁰Perubahan ke *stadsgemeente* tersebut merupakan cikal bakal Kota Mojokerto. Penetapan tersebut diperingati sebagai hari jadi Kota Mojokerto hingga saat ini.

diaspal dan beberapa sudut. Begitu juga dengan kampung, penataan di perkampungan dilakukan dengan subsidi dari pemerintah. Infrastruktur lain seperti tandon air, jamban, dan saluran air bersih juga dibangun.¹¹

Sejak diberikan status sebagai sebuah kota otonom, dewan kota Mojokerto mulai memberikan perhatian pada kampung. Dewan kota berupaya untuk melakukan modernisasi dalam perkampungan, salah satunya melalui perbaikan kampung. Sejak tahun 1930, dana untuk perbaikan kampung sudah dialokasikan. Dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kondisi kampung di Mojokerto yaitu pemeliharaan jalan, pipa, talang, dan selokan. Pada tahun tersebut, terdapat kampung yang sudah diterangi dengan lampu listrik. Setiap tahunnya, pemerintah menyediakan dana untuk perbaikan rumah penduduk asli serta pemeliharaan dan sarana umum yang lebih baik.¹²

Perbaikan kampung dilakukan selama tahun-tahun tertentu. Hal tersebut disebabkan karena dewan kota juga perlu untuk menyiapkan biaya selain mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. Perbaikan terus dilakukan didorong oleh kondisi kampung yang semakin mendesak. Pada awal hingga paruh abad ke-20, kasus-kasus penyakit dan lingkungan yang buruk seringkali diberitakan di surat kabar. Kasus pes, malaria, kolera, tifus, dan lainnya ditemukan di perkampungan Mojokerto. Selain itu, letak Mojokerto yang berada di sepanjang Sungai Brantas

¹¹Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, *op.cit.*, hlm.84.

¹²F.W.M Kerchman, *25 Jaren Decentralisatie di Nederlands-Indie*, (Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen, 1930), hlm. 434.

juga seringkali menyebabkan kampung-kampung mengalami musim banjir ketika hujan.

Pelaksanaan perbaikan kampung di Mojokerto dilakukan dengan inisiatif dewan kota. Dalam pelaksanaannya, tentu perbaikan ini akan menyentuh langsung ke penduduk kampung. Modernisasi yang mulanya hanya dilakukan untuk peningkatan kota, mulai masuk ke dalam kampung yang sebelumnya tidak pernah tersentuh sama sekali. Berbagai reaksi timbul atas kebijakan perbaikan kampung yang dilakukan oleh pemerintah kota, baik dari golongan eropa hingga bumiputera.

Perbaikan kampung di Mojokerto ini hanya dilakukan di beberapa kampung. Dalam hal ini, perbaikan hanya dilakukan di kampung tertentu sesuai dengan urgensi dari masalah yang ada di kampung terpilih. Meski tidak dilakukan secara menyeluruh ke semua kampung, namun perbaikan ini membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kesadaran penduduk kampung dalam hal kesehatan dan kepedulian pada lingkungan setempat. Adanya perubahan baik dalam segi fisik dan nonfisik yang terlihat dalam keterlibatan penduduk kampung ketika dilakukannya perbaikan, menunjukkan bahwa terdapat kemajuan dalam cara hidup masyarakat perkampungan. Hal ini yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki rasa ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan perbaikan kampung di Mojokerto pada tahun 1930-1942 dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan sumber yang telah penulis kumpulkan, kampung-kampung yang turut dilakukan perbaikan antara lain Cakarayam, Gedongsari, Sidomulyo, Sentanan

Kidul, Suronatan, Jagalan, Mangunrejo, Pengeranan, Magersari, dan Wates. Pelaksanaan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung di Mojokerto menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik ini. Dengan demikian, penelitian tersebut akan dibahas dalam penulisan sejarah yang berjudul “**Mengubah Wajah Kampung: *Kampongverbetering* di *Stadsgemeente* Mojokerto Tahun 1930-1942**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang telah ditentukan sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi perkampungan di *stadsgemeente* Mojokerto hingga menimbulkan pelaksanaan *kampongverbetering*?
2. Bagaimana kebijakan dan pelaksanaan *kampongverbetering*?
3. Bagaimana perubahan yang terjadi di *stadsgemeente* Mojokerto pasca *kampongverbetering*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara substansi, bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dan pelaksanaan perbaikan lingkungan yang terjadi di *staadsgemeente*, Mojokerto. Penjelasan tersebut di mulai dari kondisi kampung di Mojokerto hingga pelaksanaan perbaikan kampung. Hal-hal lain yang lebih kompleks akan dibahas terkait perubahan-perubahan yang terjadi terkait adanya perbaikan kampung tersebut. Secara teoritis, adanya perbaikan lingkungan dilakukan sebagai solusi atas terjadinya permasalahan kampung. Permasalahan kampung tersebut akan disinggung untuk menjawab alasan direncanakan program ini.

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam kategori sejarah lingkungan. Dalam hal ini, interaksi antara manusia dengan lingkungan terjadi dalam konteks perkotaan. Adanya kaitan erat antara tingkat kesehatan, tingkat kemiskinan, dan ekologi kota juga akan diperhatikan dalam penelitian ini. Pada tulisan ini, kedatangan orang-orang Eropa dapat diketahui memberi pengaruh terhadap perubahan kondisi lingkungan di tanah jajahan.

Secara historiografis, penelitian ini bertujuan untuk memulai sebuah studi terkait dengan pembahasan sejarah lingkungan di Mojokerto, khususnya dalam konteks perkampungan. Penelitian ini ingin menjelaskan secara lebih rinci mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kampung-kampung pada masa kolonial di Mojokerto. Permasalahan terkait dengan kondisi kampung yang buruk diatasi dengan perbaikan kampung atau yang lebih dikenal dengan *kampongverbetering*. Sepengetahuan penulis, penelitian-penelitian yang membahas mengenai hal tersebut masih seputar kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, dan Jakarta.

Penelitian ini juga memberi manfaat dalam memberikan sebuah pengetahuan terkait dengan perubahan kampung-kampung yang ada di Kota Mojokerto. Perbaikan kampung selalu dilakukan dan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan kota hingga saat ini. Dalam tulisan ini, perbaikan yang dilakukan masa kolonial dapat digunakan sebagai pembanding ataupun contoh model. Lebih besarnya lagi, semoga tulisan ini bisa digunakan sebagai bahan pengambil solusi atas kebijakan kampung-kampung yang ada di Kota Mojokerto.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan temporal yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah sejak 1930. Tahun tersebut dipilih karena merupakan awal munculnya gagasan mengenai pelaksanaan *kampongverbetering* di Mojokerto. Pada awalnya gagasan ini muncul ditujukan untuk mengatasi genangan air yang terjadi di Kampung Cakarayam dan Gedongsari.¹³ Pada batas tahun penelitian, penulis memilih tahun 1942. Tahun tersebut dipilih karena berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Hindia-Belanda. Hal tersebut mengakibatkan segala kebijakan yang sebelumnya dilaksanakan oleh *stadsgemeente* harus berhenti termasuk pelaksanaan *kampongverbetering* itu sendiri.

Perbaikan kampung yang dilakukan di Kota Mojokerto dilakukan pada tahun-tahun tertentu. Dalam batas temporal tahun yang diteliti, terdapat tahun-tahun di mana perbaikan kampung tidak dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena adanya hambatan berupa kondisi keuangan negara yang tidak stabil dan akan dibahas pada bab berikutnya. Proyek perbaikan kampung ini akhirnya berhenti bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan kolonial di Hindia-Belanda.

Batas spasial yang dipilih yaitu Mojokerto ketika berstatus *stadsgemeente*. Dibentuknya *stadsgemeente* memungkinkan pemerintah kota untuk mengelola kota itu sendiri. Pemberian status otonomi kota menyebabkan kota-kota tersebut memiliki pijakan kuat dalam membangun kotanya sendiri.¹⁴ Alasan lain pemilihan Mojokerto sebagai batas spasial karena wilayah tersebut merupakan salah satu pusat produksi gula. Jumlah pabrik gula di Mojokerto menyebabkan tersedianya

¹³*De Indische Courant*, 14-08-1930.

¹⁴Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, *op.cit.*, hlm. 111.

lapangan kerja yang luas pada wilayah ini. Hal tersebut memberi pengaruh terhadap tingkat migrasi yang ada di Mojokerto.¹⁵ Berdasarkan sensus 1930, jumlah imigran di Mojokerto tercatat sekitar 35% dari jumlah total populasi penduduk asli.¹⁶ Banyaknya orang yang berdatangan di wilayah Mojokerto memberi pengaruh pula terhadap kepadatan penduduk di wilayah ini khususnya wilayah perkampungan.

Batas spasial dari penulisan ini secara spesifik mencakup kampung-kampung di Kota Mojokerto yang menjadi target perbaikan kampung pada masa kolonial. Terdapat sepuluh kampung yang diperbaiki pada kurun waktu 1930-1942, antara lain Cakarayam, Gedongan, Sidomulyo, Suronatan, Sentanan Kidul, Magersari, Wates, Mangunrejo, Jagalan, dan Pengeranan. Perbaikan tidak dilakukan secara menyeluruh pada seluruh kampung di Kota Mojokerto, hanya sepuluh kampung tersebut yang tercatat menerima dana subsidi perbaikan kampung yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dari sebuah penelitian. Bagian ini digunakan untuk mengetahui sekaligus menelusuri hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tak hanya itu, tinjauan pustaka digunakan untuk mencegah terjadinya plagiasi atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Penelitian yang telah ditelusuri akan diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu penelitian yang terkait dengan obyek material dan penelitian yang terkait dengan perspektif yang dibahas.

¹⁵Wiwik Yulianingsih, "Sejarah Kota Mojokerto 1918-1942", dalam *Jurnal Sejarah & Budaya*, Universitas Negeri Malang, 2012, hlm. 1.

¹⁶*Volkstelling 1930: Deel III Inheemsche Bevolking van Oost-Java* (Batavia: Landsdrukkerij, 1934), hlm. 37.

Penelitian yang terkait dengan spasial Mojokerto telah banyak ditulis. Penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus tulisan dan temporal yang berbeda-beda. Pada aspek modernisasi kota, dapat ditemui tulisan yang membahas mengenai awal mula adanya listrik di Mojokerto. Tulisan tersebut berjudul “Perkembangan Listrik di Kota Mojokerto 1918-1942” tulisan dari Nur Azizah.¹⁷ Selain itu, penulisan sejarah Mojokerto lain yang membahas mengenai suatu komunitas serta budaya di dalamnya juga dapat ditemui pada “Pendidikan & Minderling: Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Mojokerto Tahun 1959-1980”, tulisan dari Lukiyati Ningsih.¹⁸ Tulisan lain yang membahas mengenai aspek yang sama juga dapat ditemui dalam penelitian yang ditulis oleh Nafi Hasan. Tulisan tersebut berjudul “Dinamika Perkembangan Nasionalisme Sekolah THHK Mojokerto: Pengaruh Sekolah THHK Terhadap Nasionalisme Etnis Tionghoa Mojokerto Th. 1946-1966”.¹⁹

Adapun penelusuran terkait dengan pembahasan penelitian mengenai *kampongverbetering* khususnya di Kota Mojokerto pada tahun 1930-1942 belum ditemui. Terdapat beberapa penelitian mengenai perbaikan tersebut namun ada pada batas spasial yang berbeda. Tempat yang ditemukan seringkali hanya membahas dalam program *kampongverbetering* dalam kota kolonial yang terbilang

¹⁷Nur Azizah, Skripsi: “Perkembangan Listrik di Kota Mojokerto 1918-1942”, (Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah Unair, 2019).

¹⁸Lukiyati Ningsih, Skripsi: “Pendidikan & Minderling: Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Mojokerto Tahun 1959-1980”, (Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah Unair, 2018).

¹⁹Nafi Hasan, Skripsi: “Dinamika Perkembangan Nasionalisme Sekolah THHK Mojokerto: Pengaruh Sekolah THHK Terhadap Nasionalisme Etnis Tionghoa Mojokerto Th. 1946-1966”, (Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah Unair, 2014).

besar seperti Semarang dan Surabaya. Selain itu literatur-literatur yang ditemukan lainnya hanya sekedar menyinggung sekilas program tersebut tanpa mendetail.

Literatur pertama yang ditemukan adalah berupa artikel dari Universitas Negeri Semarang oleh Rizky Amalia yang berjudul *Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat Gemeentee Semarang Tahun 1906-1942*.²⁰ Artikel tersebut membahas mengenai pelaksanaan program tersebut terbatas pada Semarang dan implikasi bagi kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Perubahan sosial yang disebutkan hanya dominan pada segi fisik dari sebelum dan sesudah diadakannya perbaikan kampung. Perubahan lain terkait dengan kesehatan juga dibahas namun hanya dalam porsi yang kecil. Perbedaan mendasar antara artikel diatas dengan tulisan penulis ini selain dari segi spasial ialah pembahasan yang dibahas juga akan lebih kompleks. Perubahan tidak hanya terpusat pada kondisi kesehatan setelahnya, namun hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan perubahan setelah adanya perbaikan.

Literatur kedua ialah berupa artikel dari Universitas Negeri Malang, tulisan dari Wiwik Yulianingsih yang berjudul *Sejarah Kota Mojokerto Tahun 1918-1942*.²¹ Artikel ini membahas mengenai sejarah Kota Mojokerto sejak menjadi *gemeente* hingga berakhirnya kekuasaan kolonial di Hindia-Belanda. Pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pembangunan kota banyak diulas khususnya dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini,

²⁰Rizky Amalia, "Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat Gemeente Semarang Tahun 1906-1942", dalam *Jurnal of Indonesian History Vol. 5 No. 1*, Universitas Negeri Semarang, 2016.

²¹Wiwik Yulianingsih, *loc.cit.*

tulisan terkait perbaikan kampung pada masa tersebut sudah disinggung, namun hanya dalam satu kalimat. Perbaikan kampung yang disebut hanya terbatas pada kampung Cakarayam dan Gedongsari. Melalui artikel tersebut, tulisan ini mencoba untuk mengembangkan dan menjelaskan lebih rinci terkait perbaikan kampung di Mojokerto masa kolonial yang sempat disinggung.

Literatur ketiga yang digunakan ialah disertasi dari Dr. Sarkawi B. Hussain yang berjudul *Mengubah dan Merusak Lingkungan Mengundang Air Bah: Banjir di Kota Surabaya pada Paruh Kedua Abad ke-20*.²² Pada disertasi ini terdapat sub bab yang berjudul “Perbaikan Lingkungan sebagai Instrumen Pengendalian Banjir”. Pada sub bab ini disinggung mengenai perbaikan kampung di Surabaya dari periode ke periode. Periode tersebut diawali dari masa kolonial dengan penyebutan *kampongverbetering* hingga orde baru dengan penyebutan *kampung improvement programme*. Disertasi tersebut juga memberi gambaran pada penulis terkait jalan cerita perbaikan kampung pada masa kolonial, meski pada spasial Surabaya.

Literatur keempat ialah buku mengenai sejarah kota Mojokerto terbitan dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto yang berjudul *Kota Mojokerto dalam Lintas Hikayat dan Sejarah*.²³ Buku ini berisi mengenai sejarah panjang Kota Mojokerto dimulai dari penggantian nama dari Japan ke Mojokerto hingga terbentuknya *gemeente*. Berbagai aktivitas masyarakat Mojokerto pada saat itu

²²Dr. Sarkawi B. Hussain, Disertasi: “Mengubah dan Merusak Lingkungan Mengundang Air Bah: Banjir di Kota Surabaya pada Paruh Kedua Abad ke-20”, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2016).

²³Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto, *loc.cit.*

dibahas dalam buku ini juga dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masa lampau. Berkaitan dengan penelitian ini, bahasan mengenai *kampungverbetering* atau perbaikan kampung sama dengan artikel sebelumnya, hanya terdapat pada satu kalimat, yaitu pada kampung Cakarayam dan Gedongsari pada 1931. Selain itu, pembahasan lainnya banyak terkait dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada masa kolonial di Mojokerto. Buku ini sangat membantu penulis untuk mengetahui sejarah Mojokerto dimulai dari periode kolonial. Hal terpenting lainnya ialah di dalam buku tersebut juga disinggung mengenai kondisi kampung yang ada di Mojokerto pada masa kolonial meski hanya sedikit.

Literatur berikutnya adalah penelitian dari Adrian Perkasa berjudul “Dari *Kampungverbetering* ke Kampung Improvement Program: Program Perbaikan Kampung di Surabaya di Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan.”²⁴ Penelitian ini memberi informasi pelaksanaan perbaikan kampung di Surabaya dalam beberapa periode. Perbaikan yang sempat berhenti pada masa kolonial karena krisis malaise kemudian dilanjutkan pada tahun 1960-an, tepatnya pada tahun 1969 dengan program KIP W.R. Supratman.

Selanjutnya, penelitian dari Latifatul Miskiyyah yang berjudul “Memukimkan Masyarakat Yang Terpinggirkan Di Kota Mojokerto Tahun 1970-1987: Kampung Rehabilitasi Cakarayam II Dan Balongcangkring II”.²⁵ Penelitian

²⁴Adrian Perkasa, “Dari *Kampungverbetering* ke Kampung Improvement Program: Program Perbaikan Kampung di Surabaya di Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan”, dalam Arya W. Wirayuda (ed.), *Kota dan Jejak Aktivitas Perabadian*, (Airlangga University Press, 2019), hlm. 227-251.

²⁵Latifatul Miskiyyah, Skripsi: “Memukimkan Masyarakat Yang Terpinggirkan di Kota Mojokerto Tahun 1970-1987: Kampung Rehabilitasi Cakarayam II dan Balongcangkring II”, (Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah Unair, 2020).

ini membahas mengenai rehabilitasi yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun nonfisik dari kedua kampung tersebut pada kurun waktu 1970-1987. Secara fisik dilakukan dengan melakukan pembangunan tempat tinggal sedangkan nonfisik dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan kerja untuk penduduk yang tuna karya, tuna wisma, dan tuna susila.

Terakhir ialah buku tahun 1930 yaitu *25 Jaren Decentralisatie di Nederlands-Indie* tulisan dari F.W.M. Khercman.²⁶ Buku ini membahas mengenai kota-kota yang sudah berubah status karena adanya desentralisasi 1903. Dalam buku ini, terdapat beberapa halaman yang menuliskan mengenai Mojokerto masa tersebut. Pada halaman tersebut, dijelaskan terkait dengan pembangunan-pembangunan di Mojokerto pada masa tersebut. Pembahasan terkait dengan kondisi dan perbaikan kampung di wilayah ini juga disinggung meski sangat sedikit. Sama halnya dengan penelitian yang dibahas sebelumnya, dikatakan bahwa perhatian pemerintah kota terhadap kampung pada masa *gemeente* mulai ada, hal tersebut terlihat dari adanya penerangan pada dua kampung dan mulai dialokasikannya dana untuk rencana perbaikan kampung di tahun mendatang.

Beberapa penelitian terkait Mojokerto yang sudah dijelaskan di atas memang sudah mulai menyinggung adanya pelaksanaan perbaikan kampung. Meskipun hanya dibahas dalam porsi yang sangat kecil yaitu dalam beberapa kalimat saja. Oleh karena itu, penulis ingin menggali lebih dalam terkait dengan perbaikan kampung di Mojokerto tersebut secara lebih dalam.

²⁶F.W.M. Kerchman, *op.cit.*

1.6. Kerangka Konsep

Berkaitan dengan fokus penelitian yang telah disebutkan dalam latar belakang, maka peneliti perlu untuk menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Konsep-konsep tersebut perlu dipahami untuk menggambarkan peristiwa yang diangkat. Konsep-konsep tersebut ialah mengenai kampung, pemukiman kumuh, dan perbaikan kampung itu sendiri.

Keberadaan kampung di perkotaan merupakan realitas yang tidak dapat terelakkan. Kampung sudah ada sejak masa pra-modern yang keberadaannya terjadi secara alamiah. Keberadaannya yang tidak direncanakan, kadangkala membuat kampung menjadi suatu wilayah yang dianggap sebagai sumber kesemrawutan. Kata kampung seringkali diidentikkan dengan tempat yang kumuh dan kurang pelayanan. Kesenjangan antara kaya dan miskin begitu terlihat jika dilihat melalui keberadaan kampung di perkotaan.

Hans Dieter Evers dalam bukunya mendeskripsikan mengenai gambaran kampung yang lebih terikat pada “desa” dan komunitas-komunitas, dengan demikian bukan hanya fisik yang menjadi acuan namun lebih kepada penghuninya.²⁷ Hans Dieter Evers melihat kota-kota besar modern di Asia Tenggara ini berasal dari kota-kota yang didirikan oleh pemerintah kolonial pada masa lalu. Kota-kota ini telah direncanakan dan bertumbuh berdasarkan asumsi bahwa suku dan asal etnik merupakan prinsip-prinsip utama dari organisasi sosial. Akibatnya, daerah-daerah perkotaan diatur dalam segmen-segmen yang

²⁷Hans Dieter Evers dan Rudiger Korff, *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Inonesia, 2002), hlm. 408.

memisahkan etnis-etnis dalam lokasi-lokasi pemukiman yang terpisah-pisah sehingga terbentuklah kampung-kampung untuk orang-orang Eropa, Cina, Arab, Bumiputera dan sebagainya.

Adanya segmentasi pemukiman yang dibangun oleh pemerintah kolonial berdasarkan etnis sejatinya ditujukan untuk kepentingan penguasa dan yang dikuasai. Pembangunan kota yang direncanakan pada mulanya menunjukkan bagaimana kota-kota yang ada itu harus diorganisir, yaitu dalam bentuk akomodasi pemukiman yang nyaman, jalan-jalan yang lebar, ruang-ruang yang terbuka bagi mereka yang ‘mengetahui’ bagaimana cara menggunakan fasilitas tersebut. Daerah pribumi dibiarkan dengan asumsi bahwa sebenarnya tidak ada yang dapat dilakukan untuk membantu penduduk pribumi. Akibatnya, bangunan-bangunan atau pusat-pusat kota yang diperuntukkan bagi kepentingan orang-orang Eropa dibangun berbatasan dengan pemukiman pribumi. Daerah bagi pribumi yang sangat terbatas dengan jumlah penduduk yang semakin banyak menyebabkan daerah tersebut padat.²⁸

Berbicara mengenai kampung, tulisan ini lebih memfokuskan diri pada kampung sebagai sebuah pemukiman. Perlu untuk diketahui, pemukiman seringkali disebut dengan perumahan ataupun sebaliknya. Namun, dua kata tersebut sebenarnya memiliki konsep yang berbeda. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati, yaitu *house* dan *land settlement*.

²⁸Alan Gilbert, dkk., *Urbanisasi & Kemiskinan Di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 132.

Pemukiman memberikan kesan tentang kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan sehingga pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati, yaitu manusia (*human*).²⁹

Pemukiman yang ada di kampung pada abad ke-20, menurut Von Faber bukan lagi merupakan tempat tinggal manusia, namun ia menggambarkan pemukiman bumiputera di kampung lebih mirip sebagai kandang binatang. Ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut, jumlah kemiskinan di Indonesia jumlahnya sangat besar. Kemiskinan di perkotaan pada negara Dunia Ketiga Alan Gilbert dan Josef Gugler terlihat jelas pada kawasan pemukiman. Ia menyebut pemukiman tersebut dengan istilah pemukiman spontan. Pemukiman spontan biasanya mencakup kategori-kategori sebagai berikut: (1) Sebagian besar pemukimannya dibangun oleh keluarga yang dulu menempati atau sedang menempatnya; (2) Pemukiman spontan biasanya berupa bangunan tidak legal atau kekurangan IMB; (3) Di saat pemukiman pertama kali dibangun, kebanyakan dengan infrastruktur dan pelayanan yang masih minim dan fasilitas pemukiman yang masih kurang; (4) Pemukiman tersebut ditempati oleh golongan miskin meskipun sangat terbatas.³⁰

Berbagai problematika yang menyangkut masalah perkotaan sering muncul bersamaan dengan pengembangan kota. Salah satu masalah yang melingkupi masyarakat kota adalah merosotnya kualitas lingkungan pemukiman di daerah

²⁹Dr. Adon Nasrullah J., *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 337.

³⁰Alan Gilbert, dkk., *op.cit.*, hlm. 119.

perkotaan. Permasalahan tentang menurunnya kualitas lingkungan pemukiman hingga saat ini telah diatasi dengan program perbaikan kampung atau *kampong improvement program* atau *kampongverbetering*.

Perbaikan kampung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbaikan kampung yang dilakukan oleh pemerintah kota sebagai upaya menanggulangi kompleksnya permasalahan yang ada di kampung. Secara konseptual, perbaikan kampung di Mojokerto dilakukan sebagai solusi atas permasalahan banjir dan kesehatan. Perbaikan ini melibatkan tenaga ahli karena harus mempertimbangkan segi kesehatan dan kelayakan tempat tinggal seperti di negara-negara maju pada umumnya. Sasaran utama berupa perbaikan kondisi jalan dan saluran pembuangan air. Dua hal ini dirasa penting dan memiliki urgensi untuk segera diperbaiki.

Perbaikan kampung yang dibahas dalam penelitian ini ditempatkan dalam konteks perubahan. Perkampungan yang mulanya dianggap sebagai sumber penyakit oleh pemerintah kolonial mulai di rancang untuk dijadikan sebagai perkampungan yang layak huni. Perubahan yang dibahas merupakan berkaitan dengan perubahan lingkungan. Perubahan ini dapat dilihat secara fisik dan dimaksudkan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan perbaikan tersebut bagi pola pemukiman kampung.

Selain beberapa konsep yang telah diuraikan di atas, penulis juga menggunakan landasan teori modernisasi dalam menjelaskan perbaikan lingkungan di Mojokerto. Teori modernisasi yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto ialah modernisasi mencakup suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke

arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara barat yang stabil.³¹

Dalam pengertian lain modernisasi hampir sama maknanya dengan suatu upaya untuk menyetarakan kehidupan dengan standar modern yang biasanya sudah terlebih dahulu dianut negara maju. Secara umum modernisasi diartikan sebagai keseluruhan jenis perubahan sosial progresif apabila masyarakat bergerak maju menurut skala yang diakui. Modernisasi memang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, karena setiap masyarakat manusia menginginkan perubahan yang akan membawanya ke arah yang lebih maju. Berikut adalah syarat-syarat modernisasi yaitu: (1) Cara berpikir yang ilmiah (*scientific thinking*) yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Hal ini menghendaki suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan baik. (2) Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. (3) Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang kontinu agar data tidak tertinggal. (4) Penciptaan iklim yang *favourable* dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat komunikasi massa. Hal ini harus dilakukan tahap demi tahap, karena banyak sangkut pautnya dengan sistem kepercayaan masyarakat (*bellief system*). (5) Tingkat organisasi yang tinggi, pada pihak satu berarti disiplin, sedangkan dilain pihak berarti pengurangan kemerdekaan. (6) Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial

³¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.304.

(*social planning*). Apabila itu tidak dilakukan maka perencanaan akan terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan dari kepentingan-kepentingan yang mengubah perencanaan tersebut demi kepentingan suatu golongan kecil dalam masyarakat.³²

Pada landasan berpikir diatas, pemerintahan setingkat *stadsgemeente* telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan modernisasi pada perkampungan yang sebelumnya tidak tersentuh modernitas. Pembentukan kepala pemerintahan definitif beserta perangkatnya yang merepresentasikan golongan-golongan etnis memungkinkan untuk melakukan upaya peningkatan kondisi kota, termasuk perkampungan yang mayoritas dihuni oleh bumiputera. Pada mulanya, pemberian status *stadsgemeente* hanya terbatas untuk melayani orang-orang Eropa. Namun, kondisi perkampungan yang semakin bermasalah menuntut pemerintah kota untuk dilakukannya upaya mengatasi buruknya lingkungan perkampungan yang masih berada dalam batas kota.

Modernisasi juga merupakan suatu perubahan yang terarah. Modernisasi dikatakan terarah karena ada standar yang ingin dicapai dalam prosesnya. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju ciri-ciri masyarakat yang dijadikan model. Menurut Soerjono, proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas. Kadang-kadang batas-batasnya tak dapat ditetapkan secara mutlak.

Perbaikan kampung merupakan upaya modernisasi kehidupan masyarakat kampung yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dalam hal ini upaya yang dilakukan untuk memodernisasi kampung adalah dengan cara meningkatkan sarana

³²*Ibid.*, hlm. 387.

umum bagi penduduk kampung yaitu perbaikan kondisi jalan, penyediaan pembuangan air, selokan, pemandian umum, dan fasilitas penunjang kebersihan lain bagi penduduk kampung. Modernisasi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, namun juga bagaimana mengubah pandang dan cara berpikir penduduk kampung terhadap pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan tempat tinggalnya. Adanya perbaikan kampung digunakan sebagai salah satu upaya untuk melibatkan penduduk agar sadar untuk meningkatkan dan memelihara kondisi lingkungannya.

Pola perkampungan yang pada awalnya sama sekali tidak mengedepankan aspek kesehatan mulai ditransformasi ke arah yang lebih baik. Permasalahan mengenai “*sosial hygiene*” dan sanitasi yang melanda di setiap kota besar telah dimasukkan ke dalam perencanaan tata kota dengan pertimbangan aspek kesehatan lingkungan. Lingkungan fisik yang memadai dan memenuhi syarat pemukiman bagi warga kota dengan meniru model Barat dijadikan acuan dalam upaya perbaikan kampung tersebut.

Masalah-masalah yang terjadi di perkampungan, khususnya dalam hal kesehatan dianggap ikut memengaruhi kehidupan orang-orang Eropa. Situasi yang tidak higienis di perkampungan, seperti halnya kasus penyakit, banjir, dan sampah mulai yang dipublikasikan pada awal abad ke-20 membawa kekhawatiran bagi mereka. Wabah penyakit yang melanda di Hindia-Belanda pada kurun waktu tersebut menjadikan masalah ini semakin mendesak. Penanggulangan penyakit yang ada tidak akan memiliki arti apabila perkampungan pribumi belum diatasi. *Kampongverbetering* umumnya dilakukan untuk perbaikan jalan dan sanitasi di

kampung tersebut. Hal ini merupakan masalah utama yang harus dilakukan mengingat banyak kampung yang memiliki sanitasi buruk. Perbaikan rumah penduduk atau *woningverbetering* juga turut dilakukan. Kebijakan *woningverbetering* ini sudah dilakukan sebagai upaya penanggulangan wabah pes di Hindia-Belanda.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penulisan sejarah. Tidak hanya sebatas itu, ilmu bantu juga digunakan untuk membantu menjelaskan lebih dalam mengenai gambaran topik yang akan diteliti. Metode penulisan sejarah memiliki lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber atau heuristik, verifikasi atau kritik sejarah, interpretasi, dan historiografi.³³

Setelah topik ditentukan dengan berbagai pertimbangan, maka tahapan selanjutnya adalah heuristik. Heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber berupa data sejarah yang sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Sumber yang digunakan untuk acuan penelitian ialah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah disebut primer apabila disampaikan oleh saksi mata. Misalnya, catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan seorang asisten residen abad ke-19.³⁴ Jadi, sumber primer dapat berupa dokumen tertulis atau *artifact* sezaman dan sumber lisan dari kesaksian suatu peristiwa. Sedangkan

³³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

sumber sekunder ialah yang disampaikan bukan oleh saksi mata. Ini dapat berupa buku-buku yang terkait dengan sejarah yang akan ditulis.

Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan oleh lebih banyak berasal dari dokumen tertulis. Hal ini karena ruang lingkup temporal yang dipilih oleh penulis adalah tahun 1930-1942. Dengan ruang lingkup temporal di tahun tersebut, kecil kemungkinan penulis untuk mendapatkan data primer dari sumber lisan. Sedangkan sumber-sumber sekunder meliputi buku-buku yang membahas terkait dengan topik yang diangkat. Sumber-sumber primer yang digunakan penulis antara lain surat dari gubernur Jawa Timur kepada walikota Mojokerto tentang permintaan pengisian data sehubungan dengan subsidi perbaikan kampung tahun 1940 di Pemerintah Kota Mojokerto, 9 Juli 1940 *Onderwerp Subsidie voor de Uitvoering van Kampongverbeteringzwakken voor het iaar 1940*, surat poatoesan direktoer B.B. tertanggal 19 December 1940 no. Dec. 51/8/1. 6 October 1941 no. Dec. 51/6/16), kemudian daftar arsip peta teknik mengenai kampung verbetering Soeranatan. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber foto, buku-buku sezaman, dan surat kabar lama secara online melalui situs resmi Delpher, Wereldculturen, dan Colonial Architecture.

Sumber-sumber lain yang digunakan berupa buku-buku penambah referensi yang didapat di antaranya Ruang Baca Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, dan Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Perpustakaan Daerah Kota Mojokerto, serta sumber-sumber jurnal online.

Setelah proses heuristik selesai, tahapan selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber dan keabsahan data. Verifikasi terbagi menjadi dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern.³⁵ Untuk kritik intern, penulis membaca terlebih dahulu sumber yang didapat dan mencari kesesuaian isi dengan periode dan topik yang dibahas. Sedangkan dalam kritik ekstern, penulis memerhatikan bentuk keaslian dokumen, baik dalam hal kertas, gaya tulisan, ataupun bahasa yang sekiranya sesuai dengan periode yang diteliti.

Tahap selanjutnya ialah interpretasi atau penafsiran yang merupakan tahap pencarian hubungan keterkaitan antar fakta-fakta yang telah ditemukan. Penafsiran dilakukan dengan jalan menguraikan dan menyatukan data-data yang ada. Data-data yang lolos tahap kritik, dikaitkan dengan rangkaian kata-kata logis untuk masuk ke tahap selanjutnya secara kronologis.

Tahap selanjutnya ialah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi yang merupakan tahapan akhir proses penelitian sejarah. Fakta-fakta yang telah diperoleh dari pengumpulan sumber digabungkan dan dijadikan sebagai kisah sejarah dengan logis dan ilmiah. Runtut atau kronologis sebuah cerita juga penting untuk diperhatikan. Dengan demikian proses penelitian sejarah tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang deskriptif dan analitis. Historiografi ini merupakan tujuan akhir untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menguraikan topik yang dibahas agar dapat menjadi konsumsi informasi sesuai tujuan dan sasaran manfaat yang telah ditentukan sebelumnya.

³⁵*Ibid.*, hlm. 77.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sejarah yaitu terdiri dari empat bab. Masing-masing bab disajikan secara kronologis dan berurutan untuk memudahkan pembaca memahami hasil yang ditulis. Adapun sistematika penulisan yang dimuat sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang diselenggarakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi mengenai gambaran secara umum Kota Mojokerto pada awal abad ke-20. Penjelasan diuraikan lebih lanjut melalui beberapa subbab, antara lain kondisi geografis dan morfologis Kota Mojokerto, kondisi demografis, dan sejarah administrasi Kota Mojokerto hingga kemunculan *kampongverbetering*.

Bab tiga berisi penjelasan mengenai pelaksanaan perbaikan kampung pada masa Hindia-Belanda di Kota Mojokerto. Bab ini terbagi menjadi lima subbab. Subbab pertama berisi jawaban atas rumusan masalah yang terkait permasalahan yang sering terjadi di kampung sehingga menyebabkan dilakukannya perbaikan kampung di Mojokerto dan dikatakan sebagai salah satu upaya modernisasi. Subbab kedua berisi tentang sejarah munculnya gagasan perbaikan kampung dan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan program ini. Subbab ketiga berisi mengenai realisasi pelaksanaan perbaikan kampung. Dalam subbab ini dijelaskan secara kronologis dari perbaikan kampung yang satu dengan kampung yang lain disesuaikan dengan sumber yang telah ditemukan. Tujuan tersebut agar dapat dipahami secara runtut. Selain itu, subbab

ini juga berisi menyinggung keterlibatan penduduk dalam pelaksanaan perbaikan kampung terjadi. Penulisan subbab ini untuk mengetahui pro dan kontra pelaksanaan perbaikan kampung baik dari warga kampung sendiri atau pihak lain. Dua subbab berikutnya menjelaskan tentang hambatan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari aspek fisik maupun non fisik yang dirasakan oleh masyarakat *stadsgemeente* Mojokerto pasca *kampongverbetering*. Pada subbab ini, penulis ingin menjelaskan pengaruh pelaksanaan *kampongverbetering* bagi masyarakat di sekitarnya.

Bab empat adalah bab penutup yang berisi simpulan dari bab-bab yang telah dijelaskan. Pada bab tersebut, jawaban dari seluruh rumusan masalah akan dituliskan.